




RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI**

 **0741-444015**

 **Dlhkota2017@gmail.com**

 **Dlh.jambikota.go.id**

**Jl. Jenderal Basuki Rahman
No. 8 Kota Baru**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmatNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Jambi dan Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kiranya Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah selanjutnya. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, untuk itu kami mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan dokumen ini.

Jambi, Juni 2025

Kepala DLH Kota Jambi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	7
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah	25
BAB IV. PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan. mengelola. mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. masalah yang dihadapi. dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran atau penambahan dan pengurangan anggaran. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran. perubahan indikator kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan Perubahan Renja diawali dengan penyusunan rancangan Perubahan Renja dilanjutkan penyusunan Rancangan Akhir

Perubahan Renja dan akhirnya menjadi Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025.

Renja SKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi; Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup dan tugas perbantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Dinas yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup. telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra). Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh dinas. Rencana Kerja merupakan penghubung antara Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci serta merupakan alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah untuk menyesuaikan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Kerja Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- b. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
- c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan DLH.
- d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Kota Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan selanjutnya dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja per triwulan dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) /Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi kinerja pada Triwulan I		Realisasi kinerja pada Triwulan II		%	Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7				8	9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berketahanan Iklim	Urusan Lingkungan Hidup			60.756.831.555		11.672.499.359		11.643.786.200	38,38%	DLH Kota Jambi		
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	14.883.069.391		2.754.006.543		3.287.153.178	40,59%	Sekretariat		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	70	42.610.118		13.796.025		1.813.390	36,63%	Sekretariat		

		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	18.702.330		11.733.480			62,74%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2	12.912.000		867.160		991.425	14,39%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2	4.085.910		1.195.385		821.965	49,37%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	2.807.375					0,00%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	4.102.503	3				0,00%	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	11.114.325.409		2.426.955.134		2.727.246.167	46,37%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	92	10.577.477.509		2.247.181.534		2.606.081.167	45,88%	Sekretariat

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48	524.460.000	175.723.600	120.115.000	56,41%	Sekretariat
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	10.063.850	2.700.000	1.050.000	56,41%	Sekretariat
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.324.050	1.350.000		56,41%	Sekretariat
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	40.800.000	10.200.000	7.600.000	43,63%	Sekretariat
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	40.800.000	10.200.000	7.600.000	43,63%	Sekretariat
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah	70	314.650.000	25.703.700	138.065.800	52,05%	Sekretariat
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	195.360.000		127.372.500	65,20%	Sekretariat
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	119.290.000	25.703.700	10.693.300	30,51%	Sekretariat

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	207.876.563		55.356.099		58.274.613	54,66%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	13.274.275					0,00%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	21.889.788					0,00%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	13.500.000		2.400.000		675.000	22,78%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	159.212.500		52.956.099		57.599.613	69,44%	Sekretariat
		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	535.156.723				119.973.000	22,42%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel yang disediakan	90	120.872.340				0	0,00%	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	414.284.383				119.973.000	28,96%	Sekretariat
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	1.688.871.578		187.102.995		142.721.468	19,53%	Sekretariat

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	446.100.000	81.877.325	83.641.308	37,10%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	79.199.612	40.543.170	27.647.460	86,10%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1.163.571.966	64.682.500	31.432.700	8,26%	Sekretariat
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	938.779.000	34.892.590	91.458.740	44,94%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	278.390.000	24.340.640	59.658.740	30,17%	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	53.259.000	10.551.950	4.300.000	27,89%	Sekretariat

		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	607.130.000			27.500.000	4,53%	
2		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	653.077.135				0,00%	Bidang PPLH
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Dokumen RPPLH yang tersusun	1	342.668.165				0,00%	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	342.668.165			0	0,00%	Bidang PPLH
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD	100%	310.408.970				0,00%	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS	1	310.408.970				0,00%	Bidang PPLH
3		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	1.308.024.799	130.806.865		111.131.217	18,50%	Bidang PPLH

		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	1.277.949.799	130.806.865	109.556.217	18,81%	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	2	56.601.880	6.920.000	3.785.000	0,84%	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	43.187.314	5.510.000		12,76%	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah. Air. Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air. indeks kualitas udara. indeks kualitas lahan. indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	15	420.134.625	10.045.000	6.990.000	4,05%	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi. Pembinaan. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi. pembinaan. monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2	51.005.570	35.120.703	2.250.000	73,27%	Bidang PPLH

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	77.495.690	5.570.000	4.770.000	13,34%	Bidang PPLH
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	629.524.720	67.641.162	91.761.217	25,32%	UPTD Laboratorium
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	1.800.000			0,00%	Bidang PPLH
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	1.800.000			0,00%	Bidang PPLH
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0.40%	28.275.000		1.575.000	5,57%	Bidang PPLH
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/ Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	150	28.275.000		1.575.000	5,57%	Bidang PPLH

4		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	49.97	7.812.660.758		1.689.518.177		1.600.002.850	42,11%	Bidang Kehati
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	0.08%	7.812.660.758		1.689.518.177		1.600.002.850	42,11%	Bidang Kehati
		Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	3	1.356.584.447		455.866.044		422.459.492	64,75%	UPTD Hutan Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971.18	6.098.458.510		1.183.918.633		1.149.158.530	38,26%	Bidang Kehati
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	53	357.617.801		49.733.500		28.384.828	21,84%	Bidang Kehati
5		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	26.734.045				3.124.575	11,69%	Bidang PPLH
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	9.489.825				3.124.575	32,93%	Bidang PPLH

		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17	6.781.950				900.000	13,27%	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20	2.707.875				2.224.575	82,15%	Bidang PPLH
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	100%	17.244.220			-	-		
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	100	17.244.220			-	-		

6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	160.863.766	38.531.000	28.630.000	41,75%	Bidang P2HL
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	30%	160.863.766	38.531.000	28.630.000	41,75%	Bidang P2HL
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis. Persetujuan Lingkungan. dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	40.651.651	14.759.500	9.525.000	59,74%	Bidang P2HL
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4	42.000.000			0,00%	Bidang P2HL

		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan. Persetujuan Lingkungan. Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160	78.212.115	23.771.500	19.105.000	54,82%	Bidang P2HL
7		Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan. pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	112.965.030	750.000	1.200.000	1,73%	Bidang Kehati
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan/keompok masyarakat/institusi skala kabupaten/kota dan/atau yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDMnya	3	112.965.030	750.000	1.200.000	1,73%	Bidang Kehati

		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	51.986.250	750.000		1.200.000	3,75%	Bidang Kehati
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	9	60.978.780				0,00%	Bidang Kehati
8		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	72.294.205	22.657.920		12.790.180	49,03%	Bidang P2HL
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	72.294.205	22.657.920		12.790.180	49,03%	Bidang P2HL
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	35	13.606.445	5.676.900		750.000	47,23%	Bidang P2HL

		Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota	18	58.687.760		16.981.020		12.040.180	49,45%	Bidang P2HL
9		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	97.25%	34.238.943.826		7.036.228.854		6.599.754.200	39,83%	Bidang Pengelolaan Sampah
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	23.00	34.238.943.826		7.036.228.854		6.599.754.200	39,83%	Bidang Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	37.507.550					0,00%	Bidang Pengelolaan Sampah

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat. Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	3.448.800			1.200.000	34,79%	Bidang Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	116613 .84	25.859.020.610		5.588.809.931	5.149.859.498	41,53%	Bidang Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	11417	1.153.401.310		174.414.000	158.690.658	28,88%	Bidang Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	200000	7.185.565.556		1.273.004.923	1.290.004.044	35,67%	Bidang Pengelolaan Sampah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1.488.198.600		0	0	0,00%	

		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			1.488.198.600		0		0	0,00%	
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Blud yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1.488.198.600					0,00%	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA Perubahan berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA Perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD Perubahan. Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja perubahan (RENJA-P), rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN TAHUN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP.
ORGANISASI : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup.

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025	
				TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Kota Jambi		57.999.116.000			60.756.831.555
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB	11.879.717.610	Penambahan	BB	14.883.069.391
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		70	74.224.649	Penambahan	70	42.610.118
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2	4.948.065	Efisiensi	2	18.702.330

	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD		2	54.057.385	Efisiensi	2	12.912.000
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD		2	6.892.770	Efisiensi	2	4.085.910
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		3	3.838.331	Efisiensi	3	2.807.375
	5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		1	4.488.098	Efisiensi	1	4.102.503
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan		100%	9.498.284.526	Penambahan	100%	11.114.325.409
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		81	8.823.160.765	Penambahan	81	10.577.477.509

2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12	660.048.000	Efisiensi	12	524.460.000
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	8.270.085	Efisiensi	12	10.063.850
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	6.805.676	Efisiensi	3	2.324.050
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah		100%	40.800.000		100%	40.800.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		9	40.800.000		9	40.800.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah		70	273.550.000	Penambahan	61	314.650.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		164	136.530.000	Penambahan	164	195.360.000

	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		11	137.020.000	Efisiensi	11	119.290.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	546.304.408	Efisiensi	100%	207.876.563
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	16.874.220	Efisiensi	2	13.274.275
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	37.390.188	Efisiensi	2	21.889.788
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	26.250.000	Efisiensi	1	13.500.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	465.790.000	Efisiensi	2	159.212.500

	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	291.225.787	Penambahan	100%	535.156.723
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan						
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		11	291.225.787	Penambahan	11	414.284.383
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	819.535.101	Penambahan	100%	1.688.871.578
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	408.600.000	Penambahan	1	446.100.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	137.993.901	Efisiensi	5	79.199.612
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4	272.941.200	Efisiensi	4	1.163.571.966
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	335.793.139	Penambahan	100%	938.779.000

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20	281.470.500	Efisiensi	20	278.390.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50	54.322.639	Efisiensi	50	53.259.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			607.130.000	Penambahan	1 unit	607.130.000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD		100%	8.085.120	Penambahan	100%	653.077.135
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Tersusunya RPPLH Kota		100%		Penambahan	100%	342.668.165
	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				Penambahan	1 dokumen	342.668.165

	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD		100%	8.085.120	Penambahan	100%	310.408.970
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi		1	8.085.120	Penambahan	1	310.408.970
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi		7	1.537.463.726	Efisiensi	7	1.308.024.799
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100%	1.490.851.856	Efisiensi	100%	1.277.949.799
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2	104.193.108	Efisiensi	2	56.601.880
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK		1	75.669.291	Efisiensi	1	43.187.314

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)		15	246.600.308	Penambahan	15	420.134.625
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		2	70.285.640	Efisiensi	2	51.005.570
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1	85.816.970	Efisiensi	1	77.495.690
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		12	908.286.539	Efisiensi	12	629.524.720
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100%	4.935.120	Effisiensi	100%	1.800.000

	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2	4.935.120	Effisiensi	2	1.800.000
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup		0.40%	41.676.750	Efisiensi	0.40%	28.275.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		300	41.676.750	Efisiensi	150m2	28.275.000
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan		49.97	7.203.353.676	Penambahan	49.97	7.812.660.758
	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati RTH Kota Jambi		0.08%	7.203.353.676	Penambahan	0.08%	7.812.660.758
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		971.18	5.660.003.243	Penambahan	971.18	1.356.584.447

	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		53	365.279.403	Penambahan	53	6.098.458.510
	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota		3	1.178.071.030	Efisiensi	3	357.617.801
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		100%	62.022.212	Efisiensi	100%	26.734.045
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3		100%	38.759.435	Efisiensi	100%	9.489.825

	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		17	28.713.260	Efisiensi	17	6.781.950
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		20	10.046.175	Efisiensi	20	2.707.875
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan		100%	23.262.777	Efisiensi	100%	17.244.220
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina		100	23.262.777	Efisiensi	100	17.244.220

	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		100%	279.342.275	Efisiensi	100%	160.863.766
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup		30%	279.342.275	Efisiensi	30%	160.863.766
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis. Persetujuan Lingkungan. dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		150	105.279.850	Efisiensi	150	40.651.651
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		160	127.062.425	Efsiensi	160	42.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		9	47.000.000	Penambahan	4	78.212.115

	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	90.589.330	Penambahan	100%	112.965.030
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya		100%	90.589.330	Penambahan	100%	112.965.030
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		2	17.698.950	Penambahan	2	51.986.250
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		3	72.890.380	Efisiensi	9	60.978.780

	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	118.046.400	Efisiensi	100%	72.294.205
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	118.046.400	Efisiensi	100%	72.294.205
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		35	21.687.800	Efisiensi	35	13.606.445
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi. Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi. Penyelesaian Sengketa. dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		18	96.358.600	Efisiensi	18	58.687.760
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan		97.25%	34.339.350.651	Efisiensi	97.25%	34.238.943.826
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA		23.00%	34.339.350.651	Efisiensi	23.00%	34.238.943.826

	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		2	53.734.960	Efisiensi	2	37.507.550
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat. Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1	6.165.000	Efisiensi	1	3.448.800
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		116613.84	25.211.952.674	Penambahan	116613.84	25.859.020.610

	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan. Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan. Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		11416.94	890.762.454	Penambahan	11416.94	1.153.401.310
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional		200000	8.176.735.563	Efisiensi	200000	7.185.565.556
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				741.446.000	Penambahan		1.488.198.600
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD				741.446.000	Penambahan		1.488.198.600
	Sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			741.446.000	Penambahan	1	1.488.198.600

BAB IV PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2025. Maka Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah.

Dengan demikian diharapkan pula agar program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2025 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Jambi Juni 2025

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi**



Dr. H. ARDI. SP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700612 199803 1 004